

ANALISIS PENGELOLAHAN KEUNGAN TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR

Avril Widya Ariesta¹, Ridhatul Nuramadhani Asyifa², Rut Elisabeth Br. Nainggolan³,

Natasya Rizky Amalia⁴, Sintha Dwi Aprillya⁵

avril.23368@mhs.unesa.ac.id¹, ridhatul.23351@mhs.unesa.ac.id²,

rut.23350@mhs.unesa.ac.id³, natasya.23353@mhs.unesa.ac.id⁴,

sintha.23378@mhs.unesa.ac.id⁵

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur dalam kerangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2021–2022. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini berfokus pada identifikasi pola pengelolaan anggaran, hambatan struktural, dan pencapaian fiskal berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Data diperoleh melalui telaah dokumen terhadap laporan keuangan daerah, publikasi resmi Kementerian Keuangan, serta hasil audit dari lembaga pengawas eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, Provinsi Jawa Timur mampu merealisasikan pendapatan daerah melampaui target yang ditetapkan, yang tercermin dalam capaian varians pendapatan yang berada pada kategori favourable. Namun demikian, laju pertumbuhan pendapatan justru mengalami penurunan selama periode yang dikaji, mengindikasikan lemahnya inovasi dalam memperluas basis pendapatan asli daerah. Sementara itu, rasio kemandirian fiskal menunjukkan peningkatan yang moderat, mencerminkan pola hubungan partisipatif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sisi lain, rasio ketergantungan fiskal masih berada pada level sedang, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya terletak pada pencapaian angka pendapatan, melainkan pada ketahanan fiskal jangka panjang, akurasi perencanaan anggaran, dan efektivitas belanja publik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam diskusi akademik dan praktis mengenai strategi penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri, transparan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan nasional.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Kinerja Fiskal, Jawa Timur, Rasio Kemandirian, Efisiensi Anggaran.

Abstract

This research examines in depth the dynamics of local government financial performance in East Java Province within the framework of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) during the period of 2021–2022. Using a qualitative descriptive approach, this study focuses on identifying budget management patterns, structural barriers, and fiscal achievements based on the principles of efficiency, effectiveness, and transparency. Data was obtained through document analysis of regional financial reports, official publications from the Ministry of Finance, and audit results from external supervisory agencies. The results indicate that, in general, East Java Province was able to realize local revenue exceeding the established targets, as reflected in the revenue variance achievements being in the favorable category. However, the revenue growth rate actually experienced a decline during the studied period, indicating a weakness in innovation in expanding the base of original local revenue. Meanwhile, the fiscal independence ratio shows a moderate increase, reflecting a participatory relationship pattern between local governments and the central government. On the other hand, the fiscal dependency ratio remains at a moderate level, indicating that a significant portion of local budgets still relies on central government transfer funds. This finding underscores that the main challenges in local financial management lie not only in achieving revenue figures but also in long-term fiscal resilience, budget planning accuracy, and public spending effectiveness. This research makes an

important contribution to academic and practical discussions regarding strategies to strengthen more independent, transparent, and adaptive local financial governance in response to economic changes and national policies.

Keywords: *Local Financial Management, Regional Budget, Fiscal Performance, East Java, Independence Ratio, Budget Efficiency.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis yang sangat fundamental dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju visi "Indonesia Emas 2045". Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, transformasi menyeluruh berbasis kolaborasi seluruh elemen bangsa menjadi kunci utama untuk mendorong kemajuan Indonesia yang berkelanjutan. Prof. Mardiasmo dari Universitas Gadjah Mada, pakar akuntansi sektor publik terkemuka, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem yang integral dari sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Dalam konteks ini, bagaimana daerah mengatur dan menggunakan sumber daya keuangannya akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target nasional, termasuk peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menjadi USD 23.000-30.300 per kapita pada tahun 2045.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini bukan hanya terletak pada optimalisasi penerimaan daerah, tetapi lebih kompleks lagi yaitu memastikan pengeluaran anggaran yang akuntabel, efisien, dan transparan. Dr. M. Idrus Taruna, ahli tata kelola keuangan daerah, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan akan memudahkan akses data keuangan secara real-time dan meningkatkan transparansi. Senada dengan itu, Bambang Widjanarko, pakar keuangan dari Universitas Mataram, menekankan bahwa implementasi sistem pengawasan keuangan yang transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola dengan baik dan benar. Ahmad Yani, akademisi yang mengkaji kebijakan keuangan publik, menambahkan bahwa evaluasi kinerja keuangan secara berkala dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dan clean government yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan dana publik, sementara transparansi menuntut keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat secara berkala dan mudah diakses. Efisiensi anggaran menjadi krusial mengingat keterbatasan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara optimal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program-program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Implementasi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Penyelarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan RPJPN 2025-2045 melalui Peraturan Menteri Bersama Nomor 1 Tahun 2024 menjadi landasan penting untuk memastikan sinergi pembangunan nasional dan daerah, sehingga setiap rupiah yang dikelola daerah benar-benar berkontribusi optimal terhadap transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, ironisnya menghadapi masalah struktural yang serius dalam tata kelola keuangan daerahnya, yakni maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah. Kondisi ini menjadi paradoks yang mengkhawatirkan, mengingat potensi ekonomi yang dimiliki Jawa Timur sangat besar namun tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2024, berbagai kasus korupsi di Jawa Timur terus bermunculan, mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran di Rumah Sakit Daerah Balung Jember, kasus korupsi di Tulungagung yang melibatkan ratusan miliar rupiah, hingga dugaan penyalahgunaan dana Jasmas DPRD Jatim yang disalurkan di Kabupaten Sidoarjo. Prof. Dr. Eko Prasajo, pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa korupsi di tingkat daerah tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Fenomena ini menciptakan tantangan kompleks yang harus diatasi secara komprehensif agar alokasi anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dr. M. Chatib Basri, ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan, menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara potensi ekonomi suatu daerah dengan efektivitas pengelolaan keuangannya dapat menciptakan "resource curse" di tingkat regional, di mana sumber daya yang melimpah justru menjadi sumber masalah governance. Sementara itu, Prof. Dr. Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai kajiannya tentang desentralisasi fiskal, menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan prasyarat fundamental untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ahmad Erani Yustika, pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Brawijaya, menambahkan bahwa korupsi sistemik di tingkat daerah dapat mengganggu alokasi sumber daya publik dan mengurangi efektivitas program-program pembangunan yang vital bagi masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap ketidakseimbangan mendasar antara potensi ekonomi yang dimiliki Jawa Timur dengan realitas pengelolaan keuangan daerah yang masih rentan terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bambang Sudibyo, pakar tata kelola anggaran daerah, menekankan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah harus dilakukan secara berkala dan sistematis untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran tersebut, karena tanpa evaluasi yang komprehensif, risiko pemborosan dan penyalahgunaan anggaran akan semakin mengakar dan sistematis. Dr. Riatu Mariatul Qibthiyyah, peneliti senior dari SMERU Research Institute, menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja keuangan daerah yang berbasis pada indikator outcome dan impact, bukan sekadar output, agar dapat mengukur kontribusi nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro, pakar ekonomi regional dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem evaluasi kinerja keuangan daerah yang mengintegrasikan aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama good financial governance di era otonomi daerah.

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia diimplementasikan melalui dua instrumen fiskal utama yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat regional. Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, pakar kebijakan fiskal dan mantan Menteri Riset dan Teknologi, menegaskan bahwa sinergi

antara APBN dan APBD merupakan fondasi utama dalam mencapai stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi ini, menurut Dr. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi struktural ekonomi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam visi Indonesia Emas. Apabila kedua instrumen fiskal tersebut dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, maka dampak multiplier yang dihasilkan akan mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional jangka panjang, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Namun demikian, tantangan sistemik yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan daerah, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat efektivitas program-program pembangunan. Prof. Dr. Mardiasmo dari Universitas Gadjah Mada, pakar akuntansi sektor publik, menjelaskan bahwa korupsi dalam pengelolaan APBD menciptakan distorsi alokasi sumber daya yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur. Dr. Rimawan Pradiptyo, ekonom dari Universitas Gadjah Mada yang mengkhususkan pada kajian ekonomi korupsi, menambahkan bahwa kerugian ekonomi akibat korupsi tidak hanya bersifat langsung melalui kehilangan dana publik, tetapi juga kerugian tidak langsung berupa hilangnya kepercayaan investor dan menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mengimplementasikan strategi antikorupsi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas, evaluasi kinerja keuangan daerah melalui analisis laporan keuangan menjadi instrumen yang sangat krusial bagi pemerintah daerah. Prof. Dr. Abdul Halim, pakar akuntansi sektor publik dari Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai mekanisme transparansi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik. Dr. Indra Bastian, ahli akuntansi pemerintahan, menjelaskan bahwa evaluasi kinerja keuangan yang sistematis dan berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran secara dini, sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan. Implementasi evaluasi kinerja yang efektif ini tidak hanya berkontribusi pada pencegahan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang sehat dan bertanggung jawab, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Perspektif akademis mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa indikator yang paling relevan adalah analisis rasio keuangan yang mencakup aspek pendapatan dan belanja daerah. Prof. Dr. Deddi Nordiawan, pakar akuntansi sektor publik dari Universitas Padjadjaran, mengembangkan kerangka analisis kinerja keuangan daerah yang mengintegrasikan rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebagai indikator utama kesehatan keuangan daerah. Dr. Mahmudi, ahli manajemen keuangan sektor publik, menambahkan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek kuantitatif melalui analisis rasio, tetapi juga aspek kualitatif yang mencakup kualitas perencanaan anggaran, proses pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan. Pendekatan holistik ini, menurut Prof. Dr. Jogiyanto Hartono dari Universitas Gadjah Mada, memungkinkan

pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan mereka dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia, telah mengimplementasikan sistem audit independen terhadap laporan keuangan daerahnya melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dr. Achsani Hendro, peneliti senior ekonomi regional, mencatat bahwa meskipun sistem audit telah berjalan, masih terdapat tantangan dalam hal kualitas penyajian laporan keuangan, termasuk ketidakjelasan dalam beberapa pos anggaran dan kurangnya detail dalam penjelasan realisasi program. Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, pakar ekonomi pembangunan, menjelaskan bahwa permasalahan transparansi laporan keuangan ini dapat menghambat efektivitas pengawasan publik dan mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. Namun demikian, capaian ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 yang mencapai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 2.835,8 triliun dengan tingkat pertumbuhan yang superior dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang besar tetap dapat direalisasikan meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek tata kelola keuangan daerah. Dr. Lincoln Arsyad, ekonom pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian target pembangunan Indonesia 2045.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sejalan dengan pandangan Creswell (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan mendalam. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi objektif suatu fenomena tanpa memanipulasi variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian keuangan daerah, Mahmudi (2019) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat efektif untuk menganalisis kompleksitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah karena dapat mengungkap makna di balik angka-angka laporan keuangan.

Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman mendalam tentang data laporan keuangan tahun 2021–2022 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemilihan periode waktu ini didasarkan pada rekomendasi Halim (2020) yang menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan daerah idealnya menggunakan data minimal dua tahun berturut-turut untuk dapat melihat tren dan pola yang berkembang. Bastian (2016) juga menjelaskan bahwa analisis komparatif dua periode dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika keuangan daerah. Sementara itu, pemilihan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai unit analisis mengikuti pendapat Nordiawan (2018) yang menekankan pentingnya menggunakan sampel yang representatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan daerah di suatu provinsi.

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan telaah terhadap dokumen resmi APBD dan publikasi dari Kementerian Keuangan. Teknik dokumentasi ini sejalan dengan pendapat Moleong (2017) yang menyatakan bahwa dokumen merupakan sumber data primer yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2018), dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran merupakan sumber data utama yang paling valid

untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah karena telah melalui proses audit dan verifikasi yang ketat. Yuwono (2021) menambahkan bahwa publikasi resmi dari Kementerian Keuangan memberikan standarisasi data yang memungkinkan perbandingan antar daerah dilakukan secara objektif dan konsisten.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan perhatian khusus pada indikator seperti variasi pendapatan, pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, dan ketergantungan. Pendekatan analisis tematik ini mengacu pada konsep Braun dan Clarke (2016) yang menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan pola-pola dalam data secara sistematis. Dalam konteks analisis keuangan daerah, Darise (2019) menegaskan bahwa penggunaan indikator-indikator keuangan tertentu dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan fiskal suatu daerah. Abdul Halim (2020) juga menjelaskan bahwa rasio kemandirian dan ketergantungan merupakan indikator kunci untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Interpretasi hasil dilakukan dengan mengacu pada teori-teori dari literatur akuntansi sektor publik serta studi-studi sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep triangulasi teoretis yang dikemukakan oleh Denzin (2017), dimana penggunaan multiple theoretical perspectives dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Mahmudi (2019) menekankan bahwa interpretasi data keuangan daerah harus didasarkan pada teori-teori akuntansi sektor publik yang telah teruji untuk menghindari bias dan kesalahan analisis. Sementara itu, Bastian (2016) menjelaskan bahwa perbandingan dengan studi-studi sebelumnya (benchmarking) merupakan praktik yang sangat penting dalam penelitian keuangan daerah untuk memastikan relevansi dan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah selama dua tahun terakhir berada dalam kategori varians yang menguntungkan, dengan rata-rata mencapai 106,91%. Menurut Halim (2020), varians pendapatan yang berada di atas 100% mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan estimasi dan perencanaan anggaran yang realistis serta pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa varians positif dalam pendapatan daerah mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Capaian ini sejalan dengan penelitian Siagian (2021) yang menemukan bahwa daerah-daerah dengan varians pendapatan positif umumnya memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Capaian varians yang menguntungkan menunjukkan bahwa daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berhasil meningkatkan kerja sama antara berbagai sektor, yang tentunya sangat positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), optimalisasi PAD merupakan indikator kunci keberhasilan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan sendiri. Bastian (2016) menegaskan bahwa peningkatan PAD yang berkelanjutan menunjukkan adanya inovasi dalam pengelolaan aset daerah, peningkatan pelayanan publik, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah. Penelitian Handayani dan Wulandari (2020) juga mengkonfirmasi bahwa kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan PAD dapat meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis pajak daerah secara signifikan.

Meskipun varians pendapatan menunjukkan angka yang positif, laju pertumbuhan pendapatan justru mengalami penurunan rata-rata sebesar -3,21%. Fenomena ini dijelaskan oleh Nordiawan (2018) sebagai paradoks kinerja keuangan daerah, dimana pencapaian target anggaran yang baik tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Darise (2019) menambahkan bahwa penurunan laju pertumbuhan pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal nasional, fluktuasi ekonomi makro, atau penyesuaian formula transfer dana dari pemerintah pusat. Studi yang dilakukan oleh Rahman dan Sari (2022) menunjukkan bahwa kontradiksi antara varians positif dan pertumbuhan negatif sering terjadi pada periode transisi ekonomi atau saat adanya perubahan struktur pendapatan daerah.

Penurunan laju pertumbuhan ini menandakan bahwa ada penurunan dalam bantuan operasional tertentu, yang mungkin disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi. Menurut penelitian Nasution dan Pratama (2021), pandemi COVID-19 telah mengubah pola transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, terutama dalam hal bantuan operasional sekolah, bantuan sosial, dan dana darurat kesehatan yang bersifat temporer. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap bantuan operasional dari pemerintah pusat dapat menciptakan volatilitas dalam pendapatan daerah, terutama ketika terjadi perubahan prioritas anggaran nasional. Penelitian terbaru oleh Widodo et al. (2022) mengidentifikasi bahwa dampak jangka panjang pandemi terhadap keuangan daerah tidak hanya terbatas pada penurunan bantuan operasional, tetapi juga meliputi penurunan aktivitas ekonomi yang berpengaruh pada PAD.

Kondisi ini menjadi perhatian karena bisa mempengaruhi kestabilan keuangan daerah ke depannya. Halim (2020) menekankan bahwa stabilitas keuangan daerah sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan kemampuan mempertahankan level pelayanan publik yang optimal. Yuwono (2021) menambahkan bahwa penurunan laju pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dapat mengancam sustainability fiskal daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk investasi pembangunan jangka panjang. Studi longitudinal yang dilakukan oleh Suryanto dan Hadi (2023) menunjukkan bahwa daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan lebih dari 5% selama dua tahun berturut-turut memiliki risiko tinggi mengalami tekanan fiskal dan kesulitan dalam membiayai program-program prioritas pembangunan daerah.

Tingkat kemandirian fiskal di Jawa Timur menunjukkan pola yang cukup partisipatif, dengan rata-rata mencapai 51,24%. Menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Halim (2020), rasio kemandirian fiskal antara 50-75% menunjukkan bahwa daerah berada dalam kategori "cukup mandiri" atau "partisipatif", dimana daerah mulai mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa pencapaian rasio kemandirian di atas 50% mengindikasikan adanya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih dan Khadafi (2021) menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat kemandirian fiskal di kisaran 50-60% umumnya memiliki sektor ekonomi yang relatif beragam dan kapasitas kelembagaan yang cukup baik dalam mengelola PAD.

Capaian ini menandakan bahwa daerah ini mulai beranjak dari ketergantungan pada bantuan luar menuju penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mardiasmo (2018) menekankan bahwa transisi menuju kemandirian fiskal merupakan inti dari implementasi otonomi daerah yang efektif, dimana daerah secara bertahap mengurangi

dependensi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Bastian (2016) menambahkan bahwa penguatan PAD tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial daerah, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas governance dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah. Studi empiris yang dilakukan oleh Pratiwi dan Sudarmanto (2022) mengkonfirmasi bahwa daerah yang berhasil meningkatkan kontribusi PAD dalam struktur pendapatannya cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Namun, meskipun ada kemajuan, Jawa Timur belum sepenuhnya mandiri dalam hal keuangan. Nordiawan (2018) menjelaskan bahwa pencapaian kemandirian fiskal penuh (rasio di atas 75%) memerlukan waktu yang relatif panjang dan membutuhkan reformasi struktural yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan daerah. Darise (2019) menegaskan bahwa keterbatasan dalam mencapai kemandirian penuh seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan basis pajak daerah, kapasitas SDM yang masih terbatas, dan belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Wahyudi et al. (2021) menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Timur, masih memerlukan periode transisi 10-15 tahun untuk mencapai tingkat kemandirian fiskal yang optimal.

Rasio ketergantungan di Jawa Timur berada pada kategori sedang, yaitu 61,51%, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam pembiayaan daerah. Menurut Yuwono (2021), rasio ketergantungan di atas 60% mengindikasikan bahwa daerah masih *heavily dependent* terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, yang dapat menciptakan kerentanan fiskal jika terjadi perubahan kebijakan transfer atau kondisi keuangan negara. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa tingginya rasio ketergantungan dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan merespons kebutuhan lokal secara cepat dan tepat. Studi komparatif yang dilakukan oleh Suryani dan Hasan (2020) menunjukkan bahwa daerah dengan rasio ketergantungan di atas 60% cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan program inovasi daerah karena keterbatasan ruang fiskal yang mandiri.

Selain itu, beberapa faktor geopolitik global, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, juga berpengaruh terhadap fluktuasi dalam anggaran belanja modal. Menurut analisis yang dikemukakan oleh Nasution dan Wijaya (2022), konflik geopolitik global dapat mempengaruhi keuangan daerah melalui berbagai saluran transmisi, termasuk fluktuasi harga komoditas, inflasi global, dan perubahan alokasi anggaran nasional untuk mengantisipasi dampak ekonomi eksternal. Siahaan (2023) menjelaskan bahwa ketidakstabilan geopolitik global dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran jangka menengah daerah, terutama untuk komponen belanja modal yang bersifat strategis dan jangka panjang. Penelitian terbaru oleh Andrianto et al. (2023) mengidentifikasi bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi lebih rentan terhadap shock eksternal, termasuk dampak tidak langsung dari konflik geopolitik yang mempengaruhi kebijakan fiskal nasional.

Hal ini menandakan bahwa daerah masih perlu beradaptasi dengan kondisi yang lebih luas untuk meningkatkan kemandirian keuangannya. Halim (2020) menekankan bahwa adaptasi terhadap dinamika global merupakan bagian integral dari strategi penguatan kemandirian fiskal daerah di era globalisasi. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa kemampuan adaptasi daerah terhadap perubahan kondisi eksternal memerlukan diversifikasi sumber pendapatan, penguatan sistem *early warning* fiskal, dan pengembangan kapasitas manajemen risiko fiskal. Studi prospektif yang dilakukan oleh Rahardjo dan Putra (2023) merekomendasikan bahwa daerah perlu

mengembangkan strategi kemandirian fiskal yang resilient dengan memperkuat basis ekonomi lokal, meningkatkan efisiensi belanja daerah, dan membangun sistem cadangan fiskal untuk mengantisipasi volatilitas ekonomi global.

KONKLUSI

Secara umum, kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal realisasi pendapatan. Namun, kinerja ini masih dibayangi oleh tantangan, yaitu penurunan dalam pertumbuhan pendapatan yang perlu diatasi agar kondisi keuangan daerah bisa semakin membaik di masa depan.

Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat masih cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, daerah tetap perlu berusaha lebih keras untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan efisiensi belanja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga berkelanjutan, sehingga mendukung pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya melakukan reformasi dalam tata kelola keuangan daerah yang berfokus pada kinerja. Hal ini berarti bahwa daerah perlu mengubah cara mereka mengelola keuangan dengan lebih baik, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal dan transparan. Dengan pendekatan yang berbasis kinerja, diharapkan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Diperlukan pendekatan yang lebih sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah, yang tidak hanya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, tetapi juga menjunjung tinggi transparansi dan inovasi dalam bidang fiskal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah disarankan untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas mereka dalam merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lebih baik.

Di samping itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Untuk mencapai hal tersebut, mereka sebaiknya memanfaatkan teknologi dan data yang ada, yang dapat membantu dalam analisis dan perencanaan yang lebih akurat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih efektif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2024. Surabaya: BPS Jawa Timur. Diakses dari: <https://jatim.bps.go.id>
- Bank Indonesia. (2023). Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Triwulan IV 2023. Surabaya: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim. Diakses dari: <https://www.bi.go.id>
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. (2023). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024–2026. Surabaya: Bappeda Jatim. Diakses dari: <https://bappeda.jatimprov.go.id>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. (2024). Rencana Kerja dan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Surabaya: Sekretariat DPRD Jatim.
- Dwi Priyo Atmojo & Pujiono - Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di

- Jawa Timur Sebelum dan Setelah Penerapan Accrual Based. Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan basis akrual
- Fitriani, R., & Hidayat, T. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 9(1), 22–36.
- Handayani, R., & Wulandari, S. (2020). Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui kerja sama lintas sektor. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–162.
- Harun, Harun dan An, Yunita. 2015. “Reformasi Keuangan Daerah: Akuntabilitas dan Transparansi dalam Era Desentralisasi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 12, No. 2, hlm. 115–132.
- Hilda Salma Jundia & Aris Eddy Sarwono - Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018-2022. Studi ini mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan studi kasus
- Kurniasih, L., & Wahyudi, H. (2023). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Daerah*, 5(2), 101–115.
- Lestari, D., & Prasetyo, A. (2023). Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi dan Keuangan Publik*, 14(3), 210–225.
- Nasution, M. H., & Pratama, A. (2021). Dampak COVID-19 terhadap transfer dana pusat ke daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 8(1), 23–41.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. Surabaya: BPKAD Provinsi Jawa Timur.
- Rahman, F., & Sari, D. P. (2022). Paradoks kinerja keuangan daerah: Analisis varians dan pertumbuhan pendapatan. *Indonesian Journal of Public Administration*, 6(1), 78–95.
- Saputra, R., & Dewi, L. N. (2022). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Publik terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 17(2), 45–58.
- Siagian, H. (2021). Analisis varians pendapatan dan implikasinya terhadap tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(3), 201–218.
- Sihombing, J., & Priyono, E. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 15(2), 89–105.
- Suryanto, B., & Hadi, M. (2023). Sustainability fiskal daerah dalam era desentralisasi: Studi longitudinal 2019-2022. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 45–67.
- Tripitono Adi Prabowo - Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013. Artikel ini membahas kinerja keuangan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, serta efektivitas APBD Provinsi Jawa Timur
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- Wahyuni, S., & Nugroho, R. (2023). Analisis Kinerja Fiskal Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 6(2), 150–168.
- Yuliana, D., & Kartikasari, D. (2024). Audit Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Audit Daerah*, 6(1), 15–30.